

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

- Rapat ke : 4 (empat)
Tahun Sidang : 2018-2019
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.
- Hari, Tanggal : Selasa, 15 Januari 2019
Pukul : 13.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : Pandangan dan tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVII/2018 mengenai Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD Republik Indonesia 1945.
- Hadir : 1. orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Bpk. Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A;
b. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M;
c. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI, yang diwakili oleh Direktur Litigasi Ditjen PP, Ardiansyah;
d. Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kemendag, Drs. Iman Pambagyo, M.A.
beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, dan Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, S.I.P.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Berkaitan dengan hal itu, Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri sebagai *leading sector* bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional demi adanya kepastian hukum.
2. Komisi I DPR RI mendorong Kementerian Luar Negeri untuk memperjelas dan mengoptimalkan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam rangka menentukan suatu perjanjian internasional yang akan dibentuk oleh pemerintah memenuhi kriteria “dapat menimbulkan akibat luas dan mendasar” sehingga memerlukan persetujuan DPR.
3. Komisi I DPR RI dan Kementerian Luar Negeri akan menindaklanjuti pembahasan mengenai mekanisme dan tata cara forum konsultasi antara Pemerintah dan DPR terkait Perjanjian Internasional.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.08 WIB.

Jakarta, 15 Januari 2019
KETUA RAPAT,

TTD

ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P.
A-340